

Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan mengacu pada (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 merupakan rencana tahun ke 4 dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas pokok Sekretariat DPRD adalah **Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 3) Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD.
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- 5) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tupoksi tersebut disusunlah tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang diperlukan dalam bentuk kebijakan, kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang direncanakan setiap tahun (RENJA) dan di aplikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimaksud untuk merealisasikan pencapaian visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yakni **Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional.**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai - nilai sebagai berikut :

- 1) Melayani publik (Anggota DPRD) dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri.
- 2) Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.
- 3) Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
- 4) Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai
- 5) Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan
- 6) Komitmen atas objektivitas dan integritas
- 7) Memandang realita sebagai evaluasi kerja
- 8) Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan.

Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD, menerapkan misi - misi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD guna mendukung tugas dan fungsi DPRD.
- 2) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional.
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja yang baik antar kegiatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan komponen lainnya.

Dengan pencapaian visi Sekretariat DPRD diharapkan sebagai salah satu pendukung / pendorong tercapainya visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu **Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya.**

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat ini mengacu pada dasar hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 yang disusun berdasarkan :

- 1) Adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang meniadakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- 2) Undang - Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
- 3) Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- 4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- 5) Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pelaksanaannya.
- 6) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 dimaksud untuk memberikan landasan dan arah kebijakan teknis operasional kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pelaksanaan program dapat mencapai hasil secara optimis dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2013 Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tupoksinya menggunakan 2 kelompok belanja, yaitu :

- I. **Belanja Tidak Langsung**, yaitu untuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dengan capaian realisasi Rp. 2.177.109.212,00 (88,07 %) dari anggaran sebesar Rp. 2.472.052.000,00
- II. **Belanja Langsung**, yaitu untuk program dan kegiatan ;

	Program & Kegiatan	Rencana		Realisasi			
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	%	Anggaran	%
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.825.587.100		91,72	1.621.658.246,78	88,83
1.	Surat Menyurat	8 Buah	194.000	-	0,00	0,00	0,00
2.	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	163.580.000	12 Bulan	100,00	158.439.227,00	96,91
3.	Jaminan kesehatan anggota DPRD (perjalanan dinas)	90 OK	722.100.000	90 OK	90,14	588.095.902,00	81,44
4.	Jaminan barang milik daerah (asuransi)	1 Tahun	8.500.000	1 Tahun	70,80	6.017.178,78	70,80
5.	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	27 Unit	18.100.000	27 Unit	100,00	12.154.500,00	67,15
6.	Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	146.246.500	1 Tahun	100,00	137.705.000,00	94,16
7.	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100,00	89.650.150,00	99,61
8.	Jasa perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	35.226.000	12 Bulan	100,00	14.870.000,00	42,21
9.	Alat Tulis Kantor	12 Bulan	64.905.600	12 Bulan	100,00	64.901.600,00	99,99
10.	Barang cetak & penggandaan	12 Bulan	109.340.000	12 Bulan	100,00	97.682.500,00	89,34
11.	Komponen instalasi listrik	130 Buah	9.700.000	130 Buah	100,00	9.700.000,00	100,00
12.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Unit	172.000.000	14 Unit	100,00	163.250.000,00	94,91
13.	Penyediaan peralatan rumah tangga	27 Lembar	1.250.000	27 Lembar	100,00	1.250.000,00	100,00
14.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	4.400.000	1 Paket	100,00	4.400.000,00	100,00
15.	Penyediaan makan & minum	10009 OH	50.045.000	10009 OH	100,00	46.020.000,00	91,96
16.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	41 OK	230.000.000	44 OK	109,98	227.522.189,00	98,92

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Meliputi Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini berupa pengiriman surat/dokumen/berkas kedinasan/dll. Ke luar daerah yang jarak tempuhnya cukup jauh sehingga menggunakan jasa pengiriman, dengan alokasi dana sebesar Rp. 194.000,- Namun pada tahun 2013 pengiriman surat/dokumen/berkas kedinasan/dll. tersebut tidak ada yang menggunakan jasa pengiriman.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini berupa Pembayaran rekening telepon, listrik, langganan koran, internet dan tv kabel pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dan rumah dinas ketua untuk 12 bulan atau 1 tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 163.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 158.439.227,00,- (96,91 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS (Pimpinan & Anggota DPRD

Kegiatan ini berupa :

- ~ Penyediaan polis asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga, dengan alokasi dana Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 269.100.000,- (89,70 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Polis berlaku sejak tanggal 06 Maret 2013 dan berakhir 05 Maret 2014, yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna.
- ~ Biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk rujukan check up dan berobat lanjutan di rumah sakit di luar daerah (30 orang 2 kegiatan = 60 OK) sebesar Rp. 450.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 318.995.902,- (70,89 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 73,33 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan polis asuransi untuk barang milik daerah berupa gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.017.178,78,- (70,80 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Polis berlaku terhitung tanggal 04 Oktober 2013 dan berakhir 04 Oktober 2014, yang dilaksanakan oleh Asuransi Sinarmas, Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas dan mobil jabatan serta Kir untuk kendaraan dinas operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 27 buah selama satu tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.154.500,- (67,15 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, (PA, bendahara, staf pengelola, pengurus dan penyimpan barang, penerima hasil pekerjaan), honorarium pejabat pengadaan barang/jasa, honorarium tenaga kontrak, materai, buku cek, biaya administrasi bank dan rekening koran keperluan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 146.246.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 137.705.000,- (94,16 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini berupa jasa cleaning service gedung kantor di Sekretariat DPRD untuk 12 bulan atau 1 tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.650.150,- (99,61 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan ini berupa perbaikan/service, perawatan 1 unit mesin foto copy, 11 unit komputer, 11 unit laptop, 11 unit printer, 1 set jaringan komputer, 1 unit handycam, 5 unit proyektor dan 2 unit sound system, untuk 1 (satu) tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.226.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.870.000,- (42,21 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 44,19 % (19 unit dari 43 unit).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

i. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini berupa pembelian alat-alat tulis kantor untuk kebutuhan Sekretariat DPRD selama 1 (satu) tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 64.905.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.901.600,- (99,99 %), dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %.

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

j. Penyediaan Jasa Barang Cetakan & Penggandaan

Kegiatan ini berupa pengadaan barang - barang cetakan seperti amplop DPRD dan Sekretariat DPRD, undangan, nota dinas, buku NCR, cetak foto, ID Card, spanduk, penyusunan profil DPRD Kobar, cetak kalender 2014 serta belanja penggandaan dan penjilidan untuk 1 (satu) tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 109.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.682.500,- (89,34 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini berupa pengadaan alat-alat listrik seperti bolam lampu sebanyak 130 buah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.700.000,- (100,00 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit mesin fotocopy, 1 buah mesin penghancur kertas, 5 unit AC, 3 unit komputer, 1 unit notebook, 2 unit printer dan 1 unit kamera digital, dengan jumlah unit sebanyak 14 unit, dengan alokasi dana sebesar Rp. 172.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.250.000,- (94,91 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini berupa pengadaan sebanyak 26 lembar tamplak meja biasa dan 1 lembar taplak meja prasmanan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.250.000,- (100,00 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Kegiatan ini berupa pengadaan buku – buku peraturan perundang – undangan sebanyak 50 buku, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.400.000,- (100,00 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

o. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makanan dan minuman harian untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 30 orang serta satpam sebanyak 5 orang dan sopir sebanyak 1 orang, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.020.000,- (91,96 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

p. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan terealisasi berupa belanja perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan biaya perjalanan dinas Sekretariat DPRD untuk mendampingi anggota DPRD study banding dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 41 OK, dengan alokasi dana sebesar Rp. 230.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 227.522.189,- (98,92 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 109,98 %.

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meliputi Kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa pengadaan 50 buah cendera mata, 2 lembar bendera merah putih, 6 buah tong sampah, 10 unit rak arsip, 1 buah tong air, 42 buah meja rapat, 1 buah podium, 72 buah kursi rapat, 2 tangga aluminium, 3 buah TV, 1 paket lampu hias, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 596.470.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 590.125.000,- (98,94 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Kegiatan ini berupa pelaksanaan perawatan rumah dinas jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk perbaikan dinding layar dan pengecatan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 20.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.400.600,- (99,03 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa pelaksanaan perawatan gedung kantor DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk pengecatan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 71.401.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.145.900,- (94,04 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan ini berupa service, penggantian suku cadang, pembelian BBM, pelumas untuk mobil jabatan Unsur Pimpinan DPRD (wakil ketua) sebanyak 3 unit, dengan jumlah alokasi dana Rp. 67.800.000,- dengan realiasi sebesar Rp. 39.200.000,- (57,82 %)

dan realisasi target kinerja output sebesar 66,67 %, kegiatan tersebut bertujuan agar mobil jabatan selalu dalam kondisi baik dan layak pakai. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, namun dana untuk 1 unit mobil jabatan ketua tidak direalisasikan karena mobil tersebut tidak digunakan dikarenakan jabatan ketua dalam kondisi kosong.

e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini berupa service, penggantian suku cadang, pembelian BBM, pelumas untuk kendaraan dinas/operasional di Sekretariat sebanyak 24 unit, dengan jumlah alokasi dana Rp. 231.851.000,- dengan realiasi sebesar Rp. 162.969.356,- (70,30 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %, kegiatan tersebut bertujuan agar kendaraan dinas/operasional selalu dalam kondisi baik dan layak pakai. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa perbaikan/service, penggantian suku cadang, perawatan 1 unit genset, 16 unit AC, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.104.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.375.000,- (75,11 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 76,47 %. (13 unit dari 17 unit).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meliputi Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini berupa pengadaan sebanyak 65 stel Pakaian Sipil Harian (PSH), 71 stel Pakaian Dinas Harian (PDH), 33 stel Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan 42 stel pakaian adat (batik daerah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 205.690.000,- dan realisasi sebesar Rp. 198.988.000,- (96,74 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meliputi Kegiatan :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

Kegiatan ini berupa pengiriman staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 184.614.500,- dan realisasi sebesar Rp. 162.203.700,- (87,86 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 92,00 %. (23 orang/kegiatan dari 25 orang/kegiatan/tahun). Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

5. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Meliputi Kegiatan :

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan ini berupa pembuatan naskah akademik ranperda inisiatif DPRD (ranperda WPR dan LUSPBB) dan pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 31 ranperda, dengan alokasi dana sebesar Rp. 337.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 310.100.000,- (92,02 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 93,75 %. (30 buah dari 32 buah). Ranperda yang belum selesai atau belum mendapatkan pengesahan yaitu sebanyak 1 buah ranperda yaitu ranperda RTRW. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

b. Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

Kegiatan ini berupa pelaksanaan hearing / dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.805.000,- (46,02 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 46,04 %. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

d. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kegiatan ini berupa pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD berupa rapat komisi, rapat fraksi, rapat badan anggaran, rapat badan musyawarah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 74.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 45.112.500,- (60,72 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 60,74 %.

e. Rapat-rapat Paripurna

Kegiatan ini berupa pelaksanaan rapat-rapat paripurna, dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 67.200.000,- (96,28 %), yaitu berupa :

1. Rapat Paripurna Istimewa : 3 kali
2. Rapat Paripurna biasa : 15 kali

c. Reses

Kegiatan ini berupa pelaksanaan kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di wilayah pemilihan. Pada tahun 2013 direncanakan reses sebanyak 3 kali, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, hal tersebut disebabkan dengan berbagai macam sebab.

f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Kegiatan ini berupa monitoring, tinjau lapangan, menghadiri undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan kedinasan lainnya dan untuk pegawai Sekretariat DPRD mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD, alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 128.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.725.360,- (28,69 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 100,00 %. (realisasi 75 Orang per Kegiatan dari rencana 75 Orang per Kegiatan).

g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan ini berupa pelaksanaan Kunker/Study Banding Luar Propinsi, Konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD, Pendidikan dan Pelatihan, Kunjungan Kerja Komisi, serta kegiatan kedinasan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.522.889.900,- dan realisasi sebesar Rp. 1.482.757.337,- (97,37 %) dan realisasi target kinerja output sebesar 101,00 %. (realisasi 201 Orang per Kegiatan dari rencana 200 Orang per Kegiatan).

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan pelaksanaan tupoksi melalui program dan kegiatan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup berhasil, dengan capaian prosentase target kinerja sebesar 89,10 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD terdiri dari :

1) Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewewenang DPRD.

2) Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD

Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

3) Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD, yang terdiri dari :

a. Rapat Alat kelengkapan

- Rapat Komisi
- Rapat Fraksi
- Rapat Badan Anggaran
- Rapat Badan Musyawarah
- Rapat Badan Legislasi Daerah

b. Rapat Paripurna

- Rapat Paripurna Istimewa
- Rapat Paripurna biasa

4. Pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD

Berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tentang Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas - tugas dan wewenang DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas - tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus - kursus singkat.
- 2) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :
 - a. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
 - b. Kesempatan yang luas bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar.

- c. Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran.
 - d. Perkembangan infrastruktur wilayah
2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :
- a. Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak pada penyusunan produk hukum daerah.
 - b. Kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan perencanaan legislasi serta tugas dan fungsi DPRD lainnya tidak konsisten.
 - c. Terdapatnya ketidakselarasan antara peraturan perundangan tentang legislasi daerah serta tugas dan fungsi DPRD lainnya.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :
 - a. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sistem pendukung DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 21 Tahun 2007 Perubahan Kedua Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - d. Ketersediaan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.
 - e. Dokumen - dokumen pendukung yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai acuan dalam perencanaan penyusunan legislasi daerah dan tugas - tugas serta fungsi DPRD lainnya yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan.
 - f. Sarana-prasarana pendukung perencanaan legislasi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD yang memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :
 - a. Kelembagaan pendukung DPRD yang belum optimal, antara lain belum mempunyai tenaga perancang peraturan perundang - undangan yang profesional, dan tenaga yang memahami mengenai keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD, belum tersedianya tenaga penyelia sidang dan rapat-rapat yang profesional.
 - b. Kuantitas sumber daya manusia belum mencukupi.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman diperoleh strategi alternatif sebagai berikut :

- 1) Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- 2) Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
- 3) Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
- 4) Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Sistem Pendukung DPRD,

maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah :

- 1) Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

- 2) Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik ditingkat daerah pusat maupun di tingkat provinsi termasuk swasta.
- 3) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, dimana dalam rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh DPRD, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.
- 4) Mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/Tim Ahli yang diperlukan DPRD Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang aspiratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka alat kelengkapan DPRD perlu didukung oleh tenaga ahli / kelompok pakar yang profesional, yang pembentukannya difasilitasi oleh Sekrtariat DPRD atas usul alat Kelengkapan DPRD.

Pada tahun 2014 Sekretariat DPRD akan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tupoksinya menggunakan 2 kelompok belanja, yaitu :

- I. **Belanja Tidak Langsung**, yaitu untuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dengan anggaran sebesar Rp. 2.496.770.000,00 dengan rencana target realisasi Rp. 2.247.093.000,00 (90,00 %)
- II. **Belanja Langsung**, yaitu untuk program dan kegiatan ;

No.	Program & Kegiatan	Rencana		Target Realisasi			
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	%	Anggaran	%
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.843.491.650		100,00	1.745.481.038	94,68
1.	Surat Menyurat	25 Kali	625.000	25 Kali	100,00	562.500	90,00
2.	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	201.285.150	1 Tahun	100,00	195.246.596	97,00
3.	Jaminan kesehatan anggota DPRD (perjalanan dinas)	60 OK	965.400.000	60 OK	100,00	900.000.000	93,23
4.	Jaminan barang milik daerah (asuransi)	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	100,00	14.000.000	93,33
5.	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1 Tahun	16.380.000	27 Unit	100,00	16.380.000	100,00
6.	Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	149.436.500	1 Tahun	100,00	143.459.000	96,00
7.	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	108.000.000	12 Bulan	100,00	105.000.000	97,22
8.	Jasa perbaikan peralatan kantor	37 Buah	29.780.000	37 Buah	100,00	26.802.000	90,00
9.	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	65.735.800	1 Tahun	100,00	65.078.442	99,00
10.	Barang cetak & penggandaan	1 Tahun	39.021.700	1 Tahun	100,00	35.119.530	90,00
11.	Komponen instalasi listrik	285 Biji	18.884.500	285 Biji	100,00	18.506.810	98,00
12.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	9.000.000	1 Unit	100,00	9.000.000	100,00
13.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	4.400.000	1 Paket	100,00	4.397.800	99,95
14.	Penyediaan makan & minum	10.009 OH	70.063.000	10.009 OH	100,00	64.457.960	92,00
15.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 OK	150.480.000	15 OK	100,00	147.470.400	98,00
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana		834.142.000		100,00	756.068.120	90,64
1.	Pembangunan gedung kantor						
	• Tempat umbul – umbul dan bendera	5 Buah	13.500.000	8 Buah	100,00	9.000.000	88,00
	• Meteran listrik	3 Buah	9.000.000	3 Buah	100,00	9.000.000	100,00

No.	Program & Kegiatan	Rencana		Target RealisasiNo.			
		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	%	Anggaran	%
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						
	• Umbul – umbul dan bendera merah putih	25 Lbr	5.320.000	25 Lbr	100,00	5.320.000	100,00
	• Bendera merah putih panjang	300 Mtr	51.000.000	300 Mtr	100,00	49.470.000	97,00
	• Tiang umbul – umbul dan bendera	30 Buah	9.000.000	30 Buah	100,00	9.000.000	100,00
3.	Pemel. rutin/berkala rumah jabatan						
	• Bangunan	250 M2	29.500.000	250 M2	100,00	29.205.000	99,00
	• Halaman	60 M2	600.000	60 M2	100,00	600.000	100,00
4.	Pemel. rutin/berkala gedung kantor						
	• Bangunan	650 M2	76.700.000	650 M2	100,00	72.098.000	94,00
	• Halaman	500 M2	5.000.000	500 M2	100,00	5.000.000	100,00
5.	Pemel. rutin/berkala mobil jabatan	3 Unit	120.000.000	3 Unit	100,00	108.000.000	90,00
6.	Pemel. rutin/berkala kendaraan dinas/opnal	24 Unit	487.792.000	24 Unit	100,00	439.012.800	90,00
7.	Pemel. rutin/berkala peralatan gedung kantor	17 Unit	17.730.000	17 Unit	100,00	15.957.000	90,00
C.	Peningkatan Disiplin Aparatur		249.440.000		100,00	236.968.000	95,00
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	195 Stel	249.440.000	195 Stel	100,00	236.968.000	95,00
D.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		175.000.000		100,00	166.250.000	95,00
1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	16 OK	175.000.000	16 OK	100,00	166.250.000	95,00
E.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		2.572.435.350		100,00	2.475.183.415	96,22
1.	Pembahasan ranperda	32 Buah	162.015.350	32 Buah	100,00	145.813.815	90,00
2.	Hearing/dialog	27 Kali	27.000.000	27 Kali	100,00	24.300.000	90,00
3.	Rapat alat lengkap dewan	55 Kali	60.425.000	55 Kali	100,00	54.382.500	90,00
4.	Rapat paripurna	25 Kali	167.250.000	25 Kali	100,00	150.525.000	90,00
5.	Reses	78 OK	156.000.000	78 OK	100,00	148.200.000	95,00
6.	Kunker DPRD dalam daerah	61 OK	97.350.000	100,00	100,00	87.615.000	90,00
7.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	164 OK	1.902.395.000	164 OK	100,00	1.864.347.100	98,00
	Grand Total Anggaran dan Rata-Rata Persentase		5.674.509.000		100,00	5.379.950.573	94,81

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

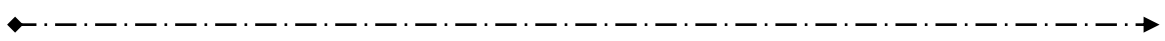
Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : Menciptakan dan menghasilkan keterpaduan dan keselarasan rumusan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dukungan sumber daya aparatur, keuangan dan sarana prasarana, memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan profesional.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat : Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD, pengelolaan dan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan melalui program - program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya organisasi.



Pada tahun 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 1.3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
- 1.4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
- 1.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- 1.6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 1.7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 1.8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
- 1.9 Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 1.10 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.
- 1.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Udangan.
- 1.14 Penyediaan Makanan dan minuman.
- 1.15 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- 2.1 Pembangunan Rumah Jabatan
- 2.2 Pembangunan Gedung Kantor
- 2.3 Pembangunan Rumah Dinas
- 2.4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan.
- 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor.
- 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan.
- 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 2.9 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 2.10 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

- 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

- 4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - udangan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan :

- 5.1 Rapat-rapat Pembahasan Rancangan Perda.
- 5.2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- 5.3 Rapat-Rapat Paripurna.
- 5.4 Kegiatan Reses.
- 5.5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah.
- 5.6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kegiatan secara rinci seperti daftar terlampir.

